

# PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI E-KATALOG PEMERINTAH DI PROVINSI RIAU

Oleh : **Mutiara Giyana Beza**

*mutiaragiyanab@gmail.com*

**Pembimbing : Dr. Febri Yuliani, S.Sos., M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

## ***Abstract***

*E-Government gives the opportunity recently to improve the quality of government, by way of increased efficiency, new services, an increase in participation of citizens and their an increase of the global information infrastructure. One of the implementation of e-government systems through the use of information and communication technology is the procurement process government goods/ services, one of which is an e-catalog system. E-catalog aims to be the creation process of the selection of goods / services are directly so that all officers can choose the goods/ services in the selection of the best, and that efisiensi the cost and time of the election of the goods/ services from the providers of goods/services and users. In the study 's authors discuss about the actuating of procurement of goods/services through government e-catalog in the province of Riau. The purpose of the study this is to find out how the actuating of procurement of goods/services through the e-catalog of research is using the method of qualitative that is descriptive. Research is using the theory of actuating Nawawi with indicators of the direction and guidance as well as communication. Results of the study showed that the actuating of procurement of goods/services through government e-catalog in the province of Riau has not been effective because still there are some things that still have to be increased again, namely in the amount and type of product that is contained in the e- catalog and also still lack a source of power human which has a certification in management of procurement of goods the government, and the required increase in the quality of the e-catalog because technology is always experiencing growth that is rapid.*

**Keywords :** *Actuating, E-Government, E-Catalog*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Majunya suatu Negara tidak terlepas dari tingkat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki Negara tersebut. Hal inilah yang mendorong Indonesia untuk mengembangkan teknologi

informasi dan komunikasi tidak hanya di bidang perdagangan saja tetapi juga di bidang pendidikan, keamanan sosial dan pemerintahan. Salah satu contoh dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pemerintahan adalah penerapan sistem *electronic government* atau yang biasa dikenal dengan *e-government*.

*E-government* memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan cara ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru, peningkatan partisipasi warga dan adanya suatu peningkatan terhadap *global information infrastructure*. Dengan demikian *e-government* akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai jalan untuk mewujudkan *good government*. Melalui *e-government*, pelayanan pemerintah akan berlangsung secara transparan, dapat dilacak prosesnya, sehingga dapat dianggap akuntabel. Unsur penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat diberikan secara efektif dan efisien, hal inilah yang menjadi dasar terbitnya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.

Salah satu implementasi sistem *e-government* melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) yang di bentuk pada tahun 2006 sesuai dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.

Menurut *website* resmi LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) pengadaan barang/jasa secara elektronik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
4. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Secara umum, *e-procurement* dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *e-tendering* (*Tendering electronic*) yang

merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

Dan yang kedua adalah tahapan *e-purchasing* yang akan penulis bahas dalam penelitian ini. *E-purchasing* adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui E-Katalog (Katalog Elektronik). *E-purchasing* menggunakan cara yang sama sekali berbeda dari *e-tendering*, pengguna barang/jasa tinggal memilih barang/jasa yang diinginkan melalui e-katalog yang terbuka serta transparan. Sistem katalog elektronik diselenggarakan oleh LKPP yang pembuatan sistem informasinya di tentukan juga oleh LKPP lakukan dengan membuat *frame work contact* dengan penyedia barang/jasa dan sekurang-kurangnya memuat informasi spesifikasi dan harga barang/jasa. Dalam *website* resmi LKPP *e-purchasing* diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terciptanya proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan semua ULP/ Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/jasa pada pilihan terbaik; dan
- b. Efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna.

E-katalog menjadi instrument dalam menciptakan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang terbuka dan efisiensi. Pembelian melalui e-katalog bisa dilakukan secara cepat dan mudah, pengadaan hanya perlu melakukan *log in* dan melakukan transaksi melalui [www.e-katalog.lkpp.go.id](http://www.e-katalog.lkpp.go.id). Dengan banyaknya pilihan dan fleksibilitas dalam membeli produk, pemerintah dapat memilih dan menentukan pembelian produk sesuai dengan kebutuhan. Informasi harga dan spesifikasi barang atau jasa yang terdaftar di e-katalog bersifat terbuka dan seluruh masyarakat dapat melihat dan melakukan kontrol. Pembelian dalam hal ini pokja dapat membandingkan harga barang yang sama dari beberapa

penyedia.

Walaupun proses penayangan produk pada portal e-katalog membutuhkan waktu yang tidak sedikit namun tidak dapat dielakkan bahwa dengan menggunakan sistem e-katalog memang akan memberi dampak pada proses pengadaan barang yang efisien dan waktu pengadaan yang lebih singkat karena proses yang di gunakan menggunakan jaringan internet, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dari sistem jaringan internet yang kurang setabil sehingga menghambat proses pembelian barang/jasa dengan e-katalog.

Walaupun pengadaan barang sudah menggunakan sistem elektronik namun tidak dapat dipungkiri komunikasi yang baik anantara setiap pihak yang terkait tetap harus terjalin dalam proses pembelian barang pemerintah agar tercapainya keberhasilan dalam pengadaan barang pemerintah. Serta dibutuhkan respon yang cepat oleh penyedia barang terhadap pesanan oleh penyedia apalagi pesanan tersebut dibutuhkan dalam keadaan mendesak atau tidak dapat ditunda.

Selain itu terbatasnya sumber daya manusia yang mampu diangkat sebagai pengelola pengadaan barang mengakibatkan pengelola harus memegang dua jabatan sekaligus dalam pengadaan barang/jasa karena untuk dapat diangkat sebagai pengelola harus memiliki sertifikasi.

Untuk itu agar tercapainya keberhasilan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog pemerintah di Provinsi Riau maka diperlukan tahapan *actuating* dalam penyelenggaraan e-katalog yang terintegrasi dan informatif. Maka dari itu berdasarkan fenomena atau latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas proposal dengan judul **“Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Katalog Pemerintah di Provinsi Riau”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut maka didapatkan rumusan masalah penelitian yang ingin dipecahkan adalah:

1. Bagaimana proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Katalog Pemerintah di Provinsi Riau?
2. Apa faktor yang menghambat proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Katalog Pemerintah di Provinsi Riau?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Katalog Pemerintah di Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Katalog Pemerintah di Provinsi Riau.

## 1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis  
Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam memberikan acuan, informasi dan data sekunder bagi pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
- b. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang, seperti ULP (Unit Layanan Pengadaan), LPSE (Lembaga Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Secara Elektronik) dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) di Provinsi Riau.

## 2. KONSEP TEORI

### 2.1 Konsep *Actuating* (Pelaksanaan)

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha

pengorganisasian dari pihak pimpinan. (Sukarna, 2011)

Setelah fungsi perencanaan selesai, pelaksanaan (*actuating*) dapat dilakukan. Agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan perencanaan maka sangat ditekankan pada bagaimana cara/strategi seorang pemimpin dalam menggerakkan pegawainya, menurut (Zanah dan Sulaksana, 2016) tindakan ini sangat penting untuk mencegah agar bawahan tidak melakukan tugasnya di bawah tekanan atau paksaan tetapi atas dasar pilihan sadar dengan penuh tanggung jawab.

Menurut (Suhardi, 2018) pelaksanaan dapat dikatakan sebagai fungsi manajemen paling utama dalam suatu organisasi, karena penekanannya pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang ada di dalam organisasi yang tentunya supaya mereka bekerja sesuai perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

Fungsi pelaksanaan harus memiliki kemampuan kerjasama dan harus bersikap obyektif. Terkait dengan konsep *actuating* yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dikatakan bahwa fungsi ini mengandung arti bahwa penggerakkan atau pengarahan adalah bagaimana pelaksanaan atau implementasi rencana-rencana yang telah ditetapkan. Memotivasi anggota melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik.

Pelaksanaan ini oleh para ahli ada kalanya diperinci lebih lanjut kedalam tiga tindakan sebagai berikut:

1. Memberikan semangat, motivasi, inspirasi, atau dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan baik.
2. Pemberian bimbingan lewat contoh-contoh tindakan atau teladan, yang meliputi beberapa tindakan seperti: pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi agar ada bahasa yang sama antara pimpinan dan bawahan, mamilih orang-orang yang menjadi anggota kelompok, dan memperbaiki sikap,

pengetahuan, dan keterampilan bawahan.

3. Pengarahan yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas, dan tegas. Segala saran-saran dan perintah atau instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas harus diberikan dengan jelas dan tegas agar terlaksana dengan baik dan terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. (Andri dan Endang, 2015)

Secara politik, pelaksanaan adalah implementasi yang perlu dipaksakan tahap secara politik karena walaupun ambiguitasnya rendah, tingkat konfliknya tinggi. Menurut (Nugroho, 2015) Tahap pelaksanaan terjadi hanya setelah keputusan hukum ditetapkan dan dana disediakan. Pelaksanaan tidak hanya bersangkut paut dengan mekanisme operasional kebijakan kedalam prosedur-prosedur birokrasi, melainkan juga terkait dengan masalah konflik keputusan dan bagaimana suatu kebijakan tersebut diperoleh kelompok-kelompok sasaran. Studi pelaksanaan kebijakan memfokuskan diri pada aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan adalah proses kerja sama antara atasan dengan karyawannya dalam mencapai efektivitas kerja yang harmonis sehingga memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan/organisasi.

Fungsi manajemen fungsional adalah pelaksanaan atau penggerakan (*actuating*) yang dilakukan setelah sebuah organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai kebutuhan satuan kerja yang dibentuk diantara kegiatannya adalah melakukan pengarahan dan bimbingan serta komunikasi (Nawawi, 2012).

1. Pengarahan dan bimbingan

Bilamana organisasi telah berfungsi, setiap personil telah siap melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, maka diperlukan kegiatan pengarahan dan bimbingan, agar pelaksanaannya berlangsung secara

efektif, efisien dan terarah pada pencapaian tujuan organisasi. Pengarahan dan bimbingan harus dilaksanakan secara kontinyu, oleh pimpinan satuan kerja pada semua personil di lingkungan masing-masing dan oleh manajer puncak/pimpinan tertinggi pada semua manajer/pimpinan satuan kerja di dalam organisasi kerjanya.

Pengarahan dan bimbingan adalah kegiatan menciptakan, memelihara, menjaga/ mempertahankan dan memajukan organisasi melalui setiap personil, baik secara structural maupun fungsional, agar langkah operasionalnya tidak keluar dari usaha mencapai tujuan organisasi.

## 2. Komunikasi

Komunikasi dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu program yang akan diterapkan mulai dari jabatan paling atas hingga paling bawah. Apabila tujuan serta sasaran dari suatu program tersebut tidak ada kejelasan maka kemungkinan akan adanya kesalahan dalam berbagai hal sehingga pelaksanaan program tersebut pun tidak terlaksana dengan baik.

Proses penyampaian berita ke bawah di dalam organisasi dari suatu organisasi ke organisasi lainnya dan komunikasi lain sering mengalami gangguan baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber dan tujuan atau sumber informasi yang tidak sama terhadap standar dan tujuan atau sumber informasi atau adanya pertentangan maka pada saat pelaksanaan program akan menemukan kesulitan untuk melaksanakan program secara intensif.

## 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena lebih mampu menemukan definisi situasi dan gejala sosial dari subjek perilaku serta motif-motif subjek yang diteliti. Maka subjek akan dapat diteliti secara langsung. Selain metode ini dapat meningkatkan pemahaman peneliti terhadap

cara subjek memandang dan menginterpretasikan kehidupannya karena itu berhubungan dengan subjek dan dunianya sendiri dalam dunia yang tidak wajar yang diciptakan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog pemerintah di Provinsi Riau.

### 3.1 Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan, sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Provinsi Riau. Alasan pemilihan lokasi ini karena Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui e-katalog. Hal ini juga terkait dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog pemerintah di Provinsi Riau. Dengan demikian memudahkan penulis dalam menganalisa fenomena-fenomena yang ada dalam melaksanakan penelitian ini.

### 3.2 Informan Penelitian

Dalam penentuan informan ini penelitian menggunakan metode *purposive sampling*.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Seksi Pengendalian dan Pelaksanaan Katalog Direktorat Pengembangan Sistem Katalog untuk Objek Data Aspek Penyelenggaraan Sistem Katalog Elektronik dan *E-Purchasing* di LKPP Jakarta.

- b. Kepala Seksi Pengendalian dan Pelaksanaan Katalog Direktorat Pengembangan Sistem Katalog untuk Objek Data Aspek Penyelenggaraan Sistem Katalog Elektronik dan *E-Purchasing* di LKPP Jakarta.
- c. Kepala Bidang Ketenaga Listrikan yang juga Bertugas Sebagai PPK.
- d. Kepala Seleksi Pengembangan Ketenagalistrikan yang juga Bertugas Sebagai PPTK.
- e. Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Pekanbaru.
- f. Sub Bagian Informasi dan Pengaduan LPSE di Pekanbaru.
- g. PT Enseval Medika Prima Selaku Penyedia di Pekanbaru.
- h. Dinas Kesehatan Provinsi Riau selaku Satuan Kerja di Pekanbaru.
- i. Dinas Teknologi Komunikasi dan Informasi Provinsi Riau selaku Satuan Kerja di Pekanbaru.

### 3.3 Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer ini diperoleh secara langsung dari wawancara dengan informan-informan dan pihak lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pencatatan sumber data primer melalui wawancara dan pengamatan yang merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Dalam hal ini data primer yaitu data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog pemerintah di Provinsi Riau.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang digunakan peneliti yaitu terdiri:

##### 1. Profil Provinsi Riau

2. Profil LKPP
3. Profil LPSE
4. *Website* resmi LKPP
5. *Website* resmi E-Katalog
6. *Website* resmi SiRUP
7. Berita dari media massa atau media elektronik tentang e-katalog
8. Jurnal-jurnal penelitian terdahulu
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
10. Surat Keputusan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Syarat dan Ketentuan Pembelian Barang Secara *Online*.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

#### a. Observasi (Pengamatan)

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Teknik ini digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog pemerintah di Provinsi Riau. Dalam pengamatan ini peneliti diperkaya dengan data-data baik dalam bentuk tertulis maupun bentuk *soft copy* yang di dapatkan di LPSE dan lembaga-lembaga terkaitlainnya, data tersebut diteliti dan dipahami lebih mendalam secara berulang-ulang untuk mendapatkan data yang dirasakan dibutuhkan dalam penelitian ini. Observasi ini dilakukan dari bulan Maret 2019 samapi Mai 2019.

#### b. Wawancara

Pengumpulan data dengan teknik wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan dan pertanyaan tersebut dicatat atau direkam. Wawancara yang dilakukan terhadap informan adalah wawancara tidak

terstruktur secara informal, dengan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan informan tanpa melupakan pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab, sehingga sasaran dan permasalahan dapat dilacak tanpa menggurui informan. Artinya secara tidak disadari oleh informan bahwa ia sedang diwawancarai. Maka penelitian ini akan menggunakan wawancara semistruktur yang menggunakan inti-inti atau pokok-pokok pembicaraan umum dalam pelaksanaan interview mengajukan pertanyaan secara bebas, pokok-pokok pertanyaan tidak perlu ditanyakan secara berurutan tetapi dapat dimodifikasi saat wawancara berlangsung.

Wawancara dilakukan secara bertahap. Hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dari narasumber yang berbeda-beda dianalisis dan dipahami secara mendalam setelah itu direkap menjadi hasil analisis dan didukung dengan hasil survey yang ditemukan di lapangan. Wawancara dilakukan dari bulan Maret sampai Oktober 2019.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah sebagai berikut:

1. Buku catatan untuk mencatat sumber data.
2. Kamera sebagai memotret kegiatan yang berkaitan dengan penelitian untuk meningkatkan keabsahan data penelitian, namun sebelum itu harus meminta izin terlebih dahulu kepada informan.
3. Recorder untuk merekam hasil percakapan dengan informan namun sebelum itu harus meminta izin terlebih dahulu kepada informan.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi dapat memberikan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog pemerintah di Provinsi Riau.

Data yang diambil melalui dokumentasi, yang bertujuan melengkapi data penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, data dapat berupa file, foto dan lain sebagainya. Selama proses penelitian, peneliti juga mengumpulkan berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen *private* (seperti buku harian, diary, surat, serta e-mail). Dokumentasi dalam penelitian ini penulis peroleh dari dokumentasi pribadi yang diambil dilapangan. Dokumentasi dilakukan dari bulan Maret 2019 sampai Mai 2019.

## 3.5 Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Hasil penelitian harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pada intinya analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data yang baik adalah data yang tepat dan dimaknai sama atau relatif sama dan tidak menimbulkan perspektif yang berbeda-beda.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data yang dilakukan pada saat pengumpulan data

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Setelah itu hasil analisis ditarik kesimpulannya yang merupakan hasil akhir dari penelitian dengan judul pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog pemerintah di Provinsi Riau. Berikut ini empat tahapan model analisis data yang peneliti lakukan:

### **3.5.1 Data Collection (Pengumpulan Data)**

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan tahapan wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti adalah kegiatan dengan melakukan perosestanya jawab langsung terhadap informan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti baik secara langsung (*face to face*), e-mail atau media lainnya, maupun terlibat langsung dalam suatu kelompok tertentu yang terdiri dari tiga sampai enam responden. Selanjutnya pengumpulan data dengan dokumentasi. Data peneliti yang berhubungan dengan penelitian ini, dan data dapat berupa file, foto, dan lain sebagainya. Selama proses penelitian, peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen *private* seperti buku harian, diary, surat, e-mail). Selain itu melakukan observasi penelitian dengan cara turun langsung ke lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti.

### **3.5.2 Data Reduction (Reduksi Data)**

Reduksi data yang dilakukan peneliti adalah dengan menelaah data yang tersedia diberbagai sumber. Setelah dikaji, langkah berikutnya adalah membuat rangkuman untuk setiap kontak atau pertemuan dengan informan. Dalam merangkum data biasanya ada satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan tersebut, kegiatan yang tidak dapat dipisahkan ini disebut membuat

abstrak, yaitu membuat ringkasan yang inti, proses, dan persyaratan yang berasal dari responden tetap terjaga.

### **3.5.3 Data Display (Penyajian Data)**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut. Dalam penelitian ini, data yang sudah direduksi di uraikan secara singkat menyangkut hal-hal yang terdapat dalam data tersebut, misalnya kekurangan dari e-katalog yang masih belum dapat diatasi sehingga diperlukan perbaikan dalam penyelenggaraan e-katalog oleh pihak terkait.

### **3.5.4 Conclusion Drawing/ Verifikasi (Penarikan Kesimpulan)**

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis dan teori.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Katalog Pemerintah di Provinsi Riau**

#### **4.1.2. Pengarahan dan Bimbingan**

Dapat kita ketahui bahwa saat ini LKPP sedang terus berusaha untuk meminimalisir kekurangan seperti tidak semua produk terdapat dalam e-katalog, sistem pembayaran yang belum terintegrasi sehingga pembayaran dilakukan di luar aplikasi e-katalog, dan dengan mengembangkan sistem pembelian barang/ jasa pemerintah dengan membuat e-katalog daerah dan e-katalog sektoral. Selain sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara dalam hal pengadaan barang/ jasa, e-katalog daerah ini juga bertujuan untuk mengembangkan peran serta penyedia lokal termasuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa LKPP tidak hanya mengembangkan sistem dan meminimalisir kekurangan yang ada pada e-katalog saja pengarahannya dan bimbingan juga dilakukan agar pelaksanaan e-katalog berjalan dengan baik. Seperti yang penulis sampaikan bahwa LKPP bersama LPSE sudah melakukan pengarahannya dan bimbingan dengan cara sosialisasi, pelatihan dan pembinaan tentang e-katalog kepada PPK selaku pembeli barang dan juga terkadang sosialisasi, pelatihan dan pembinaan yang dilakukan tersebut juga dilaksanakan ataupun disponsori oleh pihak penyedia barang. Pengarahannya dan bimbingan juga memerlukan perencanaan, struktur organisasi, tenaga kerja yang cukup, pengawasan yang efektif dan kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan bawahan. Karena semakin efektifnya proses pengarahannya maka semakin besar sumbangannya bawahan terhadap usaha mencapai tujuan.

## **4.2 Komunikasi**

Banyak komunikasi yang dilakukan dalam pengadaan barang/ jasa menggunakan e-katalog tidak hanya antara PP (pemesan) dengan PPK (pembeli) saja yang terjadi namun komunikasi antara penyedia dengan PP/ PPK juga dilakukan dalam pengadaan barang/ jasa menggunakan e-katalog, hal ini dilakukan agar PP/PPK dapat menilai produk yang penyedia tawarkan atau yang terdapat di dalam e-katalog. Komunikasi antara pelaksana dengan penyedia juga harus dilakukan agar pelaksana dapat menilai kualifikasi dari penyedia barang tersebut.

### **5.2 Faktor Penghambat Penyelenggaraan Sistem Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui E-Katalog Pemerintah di Provinsi Riau**

#### **5.2.1 Sumber Daya Manusia**

Dalam penyelenggaraan pengadaan barang melalui e-katalog di Pemerintah Provinsi Riau dibutuhkan pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/ jasa karena sistem pengadaan online yang menggunakan teknologi tidak mudah untuk dijalankan terbatasnya sumber daya manusia yang dapat menggunakan e-katalog. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang mampu diangkat menjadi pengelola dipengadaan barang/ jasa, karena untuk dapat diangkat sebagai pengelola pengadaan barang/ jasa membutuhkan sertifikat khusus pengadaan. Karena itulah membuat KPA harus memegang dua jabatan sekaligus mengakibatkan dia tidak bisa fokus dalam satu hal saja. Selain itu kemauan dari manusia itu sendiri untuk mampu menyesuaikan diri dengan hal yang baru juga harus ada, karena apabila tidak ada kemauan dari diri sendiri maka untuk dapat mempelajari hal yang baru tersebut akan sulit.

#### **5.2.2 Sumber Daya Alam**

Salah satu contoh fasilitas yang harus ada adalah ketersediaan jaringan internet yang

merupakan salah satu fasilitas yang harus ada dalam pengadaan barang menggunakan e-katalog namun sistem jaringan internet yang terkadang tidak stabil dikarenakan banyaknya pengguna yang mengakses dan melakukan transaksi membuat proses pengadaan dengan e-katalog menjadi lambat, apabila jaringan bermasalah maka mereka harus mengulang dari awal lagi proses yang telah mereka lakukan.

### 5.2.3 Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan hal yang penting dalam pengadaan barang/jasa karena pembelian barang pemerintah harus sesuai dengan dana anggaran yang dimiliki satuan kerja apabila harga barang melebihi anggaran yang dimiliki satuan kerja maka mereka tidak dapat membeli barang tersebut.

Menyusun anggaran pengadaan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan organisasi dilakukan dengan cara menghitung setiap aktifasi dan mengumpulkannya dalam paket pekerjaan. Kemudian anggaran dihasilkan dari penjumlahan keseluruhan paket pekerjaan. Selain itu perlu diperhatikan juga waktu penetapan anggaran yang berkaitan dengan sumber dana. Dalam menyusun anggaran perlu dipahami proses penyusunan anggaran pengadaan, baik yang akan dilakukan secara swakelola ataupun melalui penyedia.

Lalu harga yang ada di e-katalog itu terkadang bisa terlalu tinggi daripada pasaran yang ada padahal dari aspek biaya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah seharusnya harga yang diperoleh adalah harga kompetitif dari proses pemilihan yang akuntabel karena itu merupakan salah satu tujuan dari penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah namun nyatanya masih ada barang yang melebihi harga pasaran yang ada.

### 5.2.4 Waktu

Sistem pembelian barang/jasa pemerintah melalui e-katalog terkadang

terhalang oleh jarak dan waktu karena tidak semua kantor cabang penyedia ada disetiap daerah, hal ini membuat proses pembuatan kontrak menjadi lama ditambah lagi apabila terjadi ketidak sepakatan kontrak oleh penyedia dan pembeli maka pengiriman kontrak bisa lebih dari sekali pengiriman kontrak. Walaupun proses ini lebih cepat daripada menggunakan proses lama yaitu metode konvensional yang prosesnya cukup lama dan rumit.

Melakukan pembelian barang/jasa melalui e-katalog itu kita harus lebih banyak mengorbankan waktu kita untuk duduk didepan layar komputer lebih lama karena proses pembelian barang/ jasa pemerintah itu tidak sebentar dan mereka harus bolak-balik ke sistem untuk mendapatkan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Karena tidak semua barang terdapat di dalam e-katalog sehingga proses pembelian bisa terbagi menjadi dua cara pembelian yaitu dengan e-katalog dan tender, hal ini mengakibatkan lamanya proses pembelian barang oleh K/L/D/I.

## 6. PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog pemerintah di Provinsi Riau dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan dilapangan, maka kesimpulan akhir yang dapat peneliti ambil mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog pemerintah di Provinsi Riau adalah belum efektif karena masih terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan lagi baik dari segi sumber daya manusia, kelengkapan barang, maupun hal lainnya seperti yang terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis juga mengetahui bahwa LPSE ataupun LKPP telah melakukan sosialisasi bagi setiap

K/L/D/I sebagai pembeli agar melakukan pembelian menggunakan e-katalog.

2. Dari hasil penelitian ditemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat proses pelaksanaan pengadaan barang melalui e-katalog yaitu, masih terdapat barang yang tidak ada di dalam portal e-katalog. Tidak semua barang dapat dibeli menggunakan sistem e-katalog karena masih terdapat beberapa barang yang tidak terdaftar di dalam e-katalog karena keterbatasan penyedia dalam memasok jumlah barang yang cukup banyak. Kurangnya sumber daya manusia dari segi pembeli barang menggunakan e-katalog. Karena kemampuan daya tangkap setiap manusia berbeda-beda walaupun sudah dilakukan sosialisasi tentang e-katalog namun masih terdapat beberapa kendala dalam proses pembelian menggunakan e-katalog.

### 6.1 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Katalog Pemerintah di Provinsi Riau penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Tidak lengkapnya barang di e-katalog salah satunya dikarenakan penyedia barang tidak mampu menyediakan barang dalam jumlah yang banyak agar bias terdaftar di dalam e-katalog. Dalam hal ini sebaiknya dilakukan sosialisasi antara pihak penyedia barang dan pihak LKPP tentang kesepakatan jumlah barang yang sanggup dipasok oleh penyedia barang, agar jumlah barang yang dapat dibeli melalui e-katalog meningkat jenis dan jumlahnya sehingga lebih banyak K/L/D/I yang dapat melakukan pembelian melalui e-katalog.
2. Untuk mencegah hambatan tersebut maka alangkah lebih baiknya apabila jumlah pegawai yang dapat mengelola

pengadaan barang/jasa ditingkatkan, dengan meningkatkan pegawai yang ada maka satu orang dapat fokus mengurus satu tanggung jawab. Untuk dapat meningkatkan jumlah pegawai yang dapat mengelola pengadaan dapat melalui penambahan pegawai baru dan melakukan seleksi bagi mereka yang berpotensi dalam mengelola pengadaan dan memiliki kemaun yang kuat dalam bekerja agar dapat terbiasa menggunakan cara baru dalam melakukan pembelian barang. Agar hal ini berhasil maka dibutuhkan sosialisasi bagi pegawai baru maupun lama yang mampu membuat orang tertarik untuk dapat terbiasa menggunakan cara yang baru dan membuatnya mudah untuk dipahami.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al Bahra Bin Ladjamudin. 2012. *“Rekayasa Perangkat Lunak”*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Al Fatta, Hanif. 2010. *“Analisis dan Perancangan Sistem Informasi”*. Yogyakarta: Andi
- Badrudin. 2014. *Dasar-dasar manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Davis, Keith. 2010. *“Organizational Behavior-Human Behavior at Work 13th Edition”*. New Delhi: Mcgraw Hill Company
- Endianingsih, Dian. 2015. *“Peran E-Catalogue dalam Proses Pengadaan Elektronik”*. Vol. 13
- Feriyanto, Andri dan Endang Shyta Triana. 2015. *“Pengantar Manajemen (3 in 1)”*. Kebumen: Mediatara.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *“Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Selemba Humanika.
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *“Electronic Government: Strategi Pembangunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital”*. Yogyakarta: Andi
- Indrajit, Richardus Eko. 2005. *“E-Government In Action: Ragam Kasus Implementasi*

- Sukses di Berbagai Belahan Dunia*". Yogyakarta: Andi
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *"Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital"*. Jakarta: Andi
- Kumorotomo, Wahyudi. dan Agus, Subando Margono. 2011. *"Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-Organisasi Publik"*. Gadjah Mada University Press
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2015. *Juknis Onlineshop*. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- Maria Avilla Cahya Arfanti. 2014. *Pelaksanaan Sistem E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Mencegah Terjadinya Persengkongkolan Tender*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
- Moekijat. 2009. *"Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia"*. Jakarta: Mandar Maju
- Moleong, L. J. 2010. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Hadari. 2012. *"Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan"*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nugroho, Sarwo. 2015. *"Manajemen Warna dan Desain"*. Yogyakarta: CV Andi
- Obeng, Yunus Jackson. 2005. *"Penggunaan Media Internet dalam Pengawasan Masyarakat terhadap Praktek Birokrasi di Kota Kupang (Studi terhadap Penerapan Electronic Government melalui Website Kota Kupang.go.id pada tahun 2005)"*. Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah
- Reason, Maureen, dan Eric, Evans. 2000. *"Implementing E-Procurement"*. London: Thorogood.
- Robert L. Mathis -John H. Jackson. 2006. *"Human Resource Management"*. edisi 10. Jakarta: Salemba Empat
- Sagala, Syaiful. 2016. *"Memahami Organisasi Pendidikan: Budaya dan Reinventing, Organisasi Pendidikan"*. Jakarta: Prenada Media Group
- Suaedi, Falih; Wardiyanto, Bintoro. 2010. *"Revitalisasi Administrasi Negara (Reformasi Birokrasi dan E-Governance)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2016. *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D"*. Ed-24. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *"Memahami Penelitian Kualitatif"*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D"*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardi. 2018. *"Pengantar Manajemen dan Aplikasinya"*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sukarna. 2011. *"Dasar-Dasar Manajemen"*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutanta, Edhy. 2011. *"Sistem Informasi Manajemen"*. Yogyakarta: Andi
- Wibawa, Samodra. 2009. *"Administrasi Negara Isu-isu Kontemporer"*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Zanah, R. F. M., & Sulaksana, J. 2016. *"Pengaruh Fungsi Manajemen terhadap Kepuasan Kerja Karyawan ( Suatu Kasus di Home Industri Asri Rahayu di Wilayah Majalengka"*. Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan

#### **Jurnal:**

- Suhendri. 2015. "Efektivitas Pelaksanaan E-Procurement Dalam Mendukung Good Governance Di Provinsi Riau Oleh." 2(2):1-13.
- Swadesi, Utari. 2017. "Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pada Lpse Kota Pekanbaru." 4(2):1-13.
- Tenri Maharani Unra. 2015. "Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap

Kualitas Laporan Pengadaan Barang (Studi Pada PT PLN (Persero) Jabar-Banten).”

**Internet:**

- <https://e-katalog.lkpp.go.id>. 2016. “User Guide E-Purchasing (Penyedia/Rekanan).” Retrieved (<https://e-katalog.lkpp.go.id>) (Diakses 24 November 2018).
- <https://e-katalog.lkpp.go.id/backend/>. 2018. “E-Catalogue - LKPP.” (19):2018 (Diakses 24 November 2018).
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan\\_Pengadaan\\_Secara\\_Elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_Pengadaan_Secara_Elektronik) (Diakses 31 Oktober 2019).
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Kebijakan\\_Pengadaan\\_Barang/Jasa\\_Pemerintah](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Kebijakan_Pengadaan_Barang/Jasa_Pemerintah) (Diakses 31 Oktober 2019).
- <http://inaproc.id/pakta-integritas> (Diakses 9 Maret 2019).
- <http://inaproc.id/syarat-ketentuan> (Diakses 9 Maret 2019).
- <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro> (Diakses 21 Desember 2018).
- <http://www.lkpp.go.id/v3/#/page/6> (Diakses 9 September 2019)
- <http://www.lkpp.go.id/v3/#/profil> (Diakses 9 Maret 2019).
- <https://www.riau.go.id/home/content/61/data-umum> (Diakses 21 Desember 2018).

**Dokument:**

- Biro Administrasi Pembangunan Pengadaan Barang Dan Jasa tahun 2018
- Peraturan Lembaga LKPP No. 9 Tahun 2018. *Tata Cara E-Tendring*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018. *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018. *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

Presiden, Instruksi, Republik Indonesia, Kebijakan Dan, Strategi Nasional, Pengembangan E-government, and Presiden Republik Indonesia. 2003. *Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.

Presiden Republik Indonesia. 2004. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi*.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015*.

LKPP, Rancangan Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008. *Informasi dan Transaksi Elektronik*